



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

RENCANA KERJA

(RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2023-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja ini, saya sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Mamuju, 02 Mei 2022

Sekretaris Daerah,



Dr. Muhammad Idris, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19641115 199303 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
 Renstra Sekretariat Daerah..... 7

 2.2. Rencana dan Realisasi Output (Keluaran) Tahun 2021 16

 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
 Provinsi Sulawesi Barat..... 41

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 43

 3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah 43

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 47

 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah 47

BAB V. PENUTUP 67

 5.1 Kaidah Pelaksanaan 67

 5.2 Penutup..... 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Belanja Daerah di Sekretariat Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 6

Tabel 2.2 Tabel Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2021 7

Tabel 2.3 Tabel Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2021 15

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah 44

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2023 45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- b. Rencana Kerja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
- d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
- e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat



Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA-OPD, karena RENJA- OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - l. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025;
 - n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);



- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 kedalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Menyediakan acuan/pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 adalah Sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau



hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

BAB V Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang mengkoordinasikan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Hukum; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 3) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Biro Organisasi dan Biro Umum.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dilakukan dengan melihat capaian program dan kegiatan serta realisasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Belanja Daerah di Sekretariat Daerah
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Biro Tata Pemerintahan dan Kesra	251.544.638.377	241.056.756.333	10.487.882.044	95.83
2	Biro Hukum	2.350.657.478	2.320.800.394	29.857.084	98.73
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	1.503.047.778	1.410.484.938	92.562.840	93.84
4	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	3.710.128.060	3.462.332.150	247.795.910	93.32
5	Biro Organisasi	2.484.230.853	2.370.779.394	113.451.459,-	95,43
6	Biro Umum	98.001.142.426	96.630.937.452	1.370.204.974	98,60

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 berjumlah 10 Program dan 30 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 masing-masing biro dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.2 Tabel Rencana dan Realisasi Input (Anggaran)
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan		
		Rencana	Realisasi	%
1.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3.750.000	3.750.000	100
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	3.750.000	3.750.000	100
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3.750.000	3.750.000	100
	Program Administrasi Umum	2.157.426.150	1.407.886.037	72,87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	237.883.840	235.911.800	99,38
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.613.840	128.914.800	98,70
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.765.000	10.752.000	99,88
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.340.000	9.340.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.595.000	5.445.000	97,32
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.445.000	5.445.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.910.000	50.800.000	99,78
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.215.000	25.215.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.721.000	43.096.000	98,40
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.775.000	6.650.000	98,15
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.946.000	36.446.000	98,65
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.651.000	65.272.000	58,14
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.987.000	43.987.000	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.664.000	21.285.000	16,29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.083.129.810	818.815.409	84,78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.540.000	114.445.000	99,92
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.500.600	45.290.600	89,68
	Penyediaan Bahan/Material	126.226.930	99.524.250	78,85
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.862.280	559.555.559	70,66
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.719.500	121.034.000	55,01
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.292.000	67.505.000	90,86
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	279.427.500	53.529.000	19,16
	Pemeliharaan Barang Milik	264.321.000	123.756.828	41,50



	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.900.000	86.530.828	55,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.921.000	18.921.000	37,16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.500.000	18.305.000	31,83
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.089.517.000	1.528.659.345	51,52
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.738.292.440	602.636.070	28,43
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1.142.464.320	197.556.070	17,29
	Fasilitasi Penataan Wilayah	595.828.120	405.080.000	67,99
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	970.738.720	722.095.113	72,54
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	424.023.920	245.549.569	57,91
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	-	0	#DIV/0!
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	546.714.800	476.545.544	87,17
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	380.485.840	203.928.162	53,60
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	380.485.840	203.928.162	53,60
	Program Kesejahteraan Rakyat	246.293.945.227	238.116.460.951	56,89
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	29.023.952.644	25.399.284.091	84,36
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	25.045.950.824	22.216.336.960	88,70
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.978.001.820	3.182.947.131	80,01
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	216.993.401.323	212.634.888.200	46,71
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	216.724.358.712	212.548.654.000	98,07
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	205.036.800	86.234.200	42,06
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	64.005.811		0
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	276.591.260	82.288.660	39,61
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	69.829.180	41.568.760	59,53
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi	206.762.080	40.719.900	19,69



	Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
2.	Biro Hukum	2,350,657,478	2,320,800,394	98.73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	776,536,138	757,408,729	97.54
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147,897,200	132,694,500	89.72
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,441,500	32,426,300	99.95
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,374,000	12,374,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,774,000	2,774,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,774,000	2,774,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,774,000	2,774,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	91,996,700	76,809,200	83.49
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,763,000	2,763,000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54,218,000	54,136,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,374,000	3,374,000	100
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,774,000	2,774,000	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,774,000	2,774,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,774,000	2,774,000	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,774,000	2,774,000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36,974,000	36,892,000	99.78
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,774,000	2,774,000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	467,753,438	465,296,565	99.47
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	25,000,000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,002,800	4,992,800	99.80
	Penyediaan Bahan/Material	102,814,518	100,638,077	97.88
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334,936,120	334,665,688	99.92
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,217,500	21,134,500	99.61
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21,217,500	21,134,500	99.61
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,450,000	84,147,164	98.48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71,790,000	70,722,164	98.51
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	9,835,000	98.35

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,660,000	3,590,000	98.09
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1,574,121,340	1,563,391,665	99.32
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1,012,340,100	1,003,937,475	99.17
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	537,896,080	536,415,500	99.72
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	96,652,960	96,490,320	99.83
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	92,570,680	92,247,375	99.65
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	285,220,380	278,784,280	97.74
	Fasilitasi Bantuan Hukum	561,781,240	559,454,190	99.59
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	428,274,800	427,452,600	99.81
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	133,506,440	132,001,590	98.87
3.	Biro Ekbang			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	703.563.958	699.082.749	99,36
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	101.886.220	101.747.100	99,86
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.200.000	4.200.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.635.700	49.450.000	93,95
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.672.000	9.629.000	99,56
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.000.000	45.620.000	99,17
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.454.518	13.329.000	99,07
	Penyediaan Bahan/Material	42.874.000	42.858.500	99,96
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.171.520	317.998.272	99,95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.936.000	99,36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.670.000	84.314.877	99,58
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	509.528.800	424.431.839	83,30
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	135.750.800	134.430.767	99,03
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	125.825.300	124.095.910	98,63
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jasa Keuangan dan Aneka Usaha	216.019.800	134.332.362	62,19
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	31.932.900	31.572.800	98,87
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	289.955.020	286.970.350	98,97
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	61.274.040	60.420.500	98,61

	Wilayah			
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	228.680.980	226.549.850	99,07
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa			
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.680.990	140.410.990	99,10
	Sub Kegiatan :			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.271.090	61.271.090	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.379.900	43.129.900	97,18
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.030.000	36.010.000	99,94
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.575.000	97.381.250	85,74
	Sub Kegiatan :			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.345.000	57.151.250	97,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	55.230.000	40.230.000	72,84
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.511.080	575.986.184	96,40
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	138.000.000	138.000.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.800.000	44.360.000	94,79
	Penyediaan Bahan/Material	85.554.780	85.508.180	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.156.300	308.118.004	94,18
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.640.000	143.890.000	94,27
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.640.000	143.890.000	94,27
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.645.800	59.850.484	95,54
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.645.800	59.850.484	95,54
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			
	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.304.977.970	1.249.402.762	95,74
	Sub Kegiatan :			
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	218.980.670	206.289.010	94,20
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	983.285.300	940.403.752	95,64
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	102.712.000	102.710.000	100
	Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	699.563.420	674.864.647	96,47
	Sub Kegiatan :			
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	382.390.320	369.345.315	96,59
	Pengembangan Sistem Informasi	226.677.100	215.071.332	94,88



	Pengadaan Barang dan Jasa			
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	90.496.000	90.448.000	99,95
	Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	637.533.800	520.545.833	81,65
	Sub Kegiatan :			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	216.436.000	211.633.133	97,78
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	297.920.000	196.521.700	65,96
	Pendampingan, Konsultasi,dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	123.177.800	122.391.000	91,24
5.	Biro Organisasi			
	Program Administrasi Umum	1.147.424.773	1.083.749.164	94,45
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.230.693	194.830.480	98,78
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	92.799.913	90.399.700	97,41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.900.000	50.900.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.530.780	53.530.780	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	764.528.320	720.900.517	94,29
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.609.000	19.900.000	31,78
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.128.000	55.128.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.032.000	86.900.000	99,85
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.555.600	28.555.600	100
	Penyediaan Bahan/Material	78.082.560	78.082.560	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	453.121.160	452.334.357	99,83
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.475.760	86.919.760	84,82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.919.760	46.919.760	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	17.500.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.056.000	22.500.000	59,12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.190.000	81.098.407	97,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.190.000	81.098.407	97,49
	Program Penataan Organisasi	1.336.806.080	1.287.030.230	96,28
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	482.578.793	479.548.910	99,37
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	199.368.150	197.327.530	98,98
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	140.741.801	140.556.280	99,87
	Penataan Analisis Jabatan	142.468.842	141.665.100	99,44
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	854.227.287	807.481.320	94,53
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	263.070.063	249.354.920	94,79
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	187.150,381	179.643.670	95,99

	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	76.499.097	75.394.840	98,56
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	195.558.420	185.039.079	94,62
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	131.949.326	118.048.811	89,47
6.	Biro Umum			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	98.001.142.426	96.630.937.452	98,60%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	621.029.490	618.368.656	99,57%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	267.375.640	265.043.305	99,13%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.007.400	21.001.425	99,97%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	70.371.280	70.370.740	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.966.280	20.964.971	99,99%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	66.796.680	66.796.615	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	114.241.670	113.921.350	99,72%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.270.540	60.270.250	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.366.886.673	27.049.667.521	98,84%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.780.755.783	25.475.654.246	98,82%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	228.311.870	227.317.810	99,56%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	904.032.760	902.955.640	99,88%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	212.382.520	202.584.270	95,39%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.757.290	48.745.300	99,98%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	93.710.080	93.709.085	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72.498.310	72.298.100	99,72%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.438.060	26.403.070	99,87%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.649.428.620	3.611.569.054	98,96%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	432.692.480	423.325.501	97,84%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.131.895.040	2.110.163.275	98,98%
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	437.002.680	435.274.388	99,60%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	94.293.400	94.211.900	99,91%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	179.175.940	179.115.800	99,97%
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	374.369.080	369.478.190	98,69%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.151.634.660	1.144.086.846	99,34%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	523.325.440	522.336.135	99,81%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	149.637.540	148.743.450	99,40%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	93.268.320	92.290.025	98,95%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	54.564.360	54.561.475	99,99%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	330.839.000	326.155.761	98,58%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.505.533.385	11.480.212.749	99,78%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.212.946.960	1.212.927.185	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.527.960	91.442.910	99,91%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	513.297.480	513.265.515	99,99%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.930.926.595	6.930.900.340	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	375.917.740	375.904.920	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.183.807.350	1.183.745.220	99,99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.119.118.400	1.094.486.009	97,80%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	77.990.900	77.540.650	99,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.899.495.400	6.666.501.985	96,62%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.030.000.000	1.851.000.000	91,18%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	910.270.150	885.116.185	97,24%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.959.225.250	3.930.385.800	99,27%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.634.350.023	3.497.230.479	96,23%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.866.600	470.547.850	99,72%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.709.464.790	1.643.989.079	96,17%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.453.018.633	1.382.693.550	95,16%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.345.894.480	11.175.158.917	98,50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.305.689.580	2.241.090.992	97,20%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.175.993.920	3.082.471.096	97,06%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.190.890.500	1.184.597.079	99,47%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.673.320.480	4.666.999.750	99,86%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.280.372.174	1.269.497.586	99,15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	238.151.194	229.662.206	96,44%



	Daerah			
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42.220.980	39.835.380	94,35%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	100%
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	18.974.151.350	18.813.873.068	99,16%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.080.276.960	5.994.407.055	98,59%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4.931.976.040	4.895.741.095	99,27%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	7.961.898.350	7.923.724.918	99,52%
	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	9.050.976.501	8.808.044.586	97,32%
	Penyiapan Materi Pimpinan	2.164.817.012	2.124.216.990	98,12%
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	6.394.212.929	6.207.194.225	97,08%
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	491.946.560	476.633.371	96,89%
	Fasilitas Keprotokolan	2.521.389.670	2.496.726.005	99,02%
	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	371.321.050	371.250.900	99,98%
	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.060.943.860	1.060.897.780	100%
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.089.124.760	1.064.577.325	97,75%

2.2. Rencana dan Realisasi Output (Keluaran) Tahun 2021

Tabel 2.3 Tabel Rencana dan Realisasi Output (Keluaran)
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur				Ket
		Output (keluaran)	Rencana %	Realisasi	Persen	
1.	Biro Tata Pemerintahan					
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Ketersediaan Aset Tanah untuk Kepentingan Umum	0 %	0	0	
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Tersedianya dokumen Tanah untuk Kepentingan Umum	0 Dokumen	0	0	
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0 Dokumen	0	0	



	Program Administrasi Umum	Nilai SAKIP OPD	1878 Poin	310	97,50	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Adanya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 Dokumen	48 Dokumen	116,67	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	15 Dokumen	15 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	100	
	Administrasi Kepegawaian	Terfasilitasinya Administrasi	51 Paket	36 Paket	85	

	Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	1 Paket	1 Paket	100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Persen	35 Persen	70	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1754 Paket	1754 Paket	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dos Makanan yang dibeli	1614 Dos	1.614 Dos	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak	2 Jenis	2 Jenis	100	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	40 Jenis	40 Jenis	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	98 Laporan	98 Laporan	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	8 Unit	7 Unit	83,33	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	5 Unit	5 Unit	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	2 Unit	66,67	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	14 Unit	14 Unit	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	2 Jenis	2 Jenis	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	2 Jenis	2 Jenis	100	
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Urusan Tugas Pemerintahan	81 %	69 %	71,53	
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Adanya dokumen terkait tugas pemerintahan	58 %	58 %	66,67	
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen penamaan rupabumi unsur buatan di prov. Sulbar yang terinventarisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	56 Paket	56	100	
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen pelaksanaan otonomi daerah	20 Dokumen	9 Dokumen	47,92	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	16 Paket	7 Paket	43,75	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah rapat Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	2 Rapat	0 Rapat	0	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Adanya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	100	
	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
	Program Kesejahteraan Rakyat	-	21 %	17	73,61	
	Fasilitasi Pembinaan	Persentase	9 %	8%	87,50	

	Mental Spiritual	Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama				
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah dokumen pengelolaan sarana dan prasarana spritual	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah dokumen Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4 Dokumen	3 Dokumen	75	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase kualitas Hidup dan Kesejahteraan Pelayanan Dasar	8 %	7%	66,67	
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan	6 Laporan	6 Laporan	100	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial	1 Laporan	0 Laporan	0	
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	4 %	2 %	66,67	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33	

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				
	TOTAL	-			80,88	
2.	Biro Hukum					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ASN dengan Deskripsi pekerjaan yang sesuai	100	100	100	
		Nilai SAKIP lingkup SKPD	80 Poin			
		Tingkat dukungan mutu data sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup SKPD	4	4	100	
		Tingkat capaian kinerja anggaran lingkup SKPD	100 %	98,73 %	98,73 %	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	30 Poin			
		Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup SKPD	20 Poin	29,67 Poin	100 %	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang	1 Dokumen	1 Dokumen	100	



	SKPD	Tersusun				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	100	98,73	98,73 %	
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup SKPD	100	98,73	98,73 %	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	100 Persen	100 Persen	100	
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	100 Persen	100 Persen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersusun	3 Laporan	3 Laporan	100	

	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	100 %	100 %	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	3 Jenis	3 Jenis	100	
	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	18 Jenis	18 Jenis	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	50 Laporan	70 Laporan	140	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	23 Unit	23 Unit	100	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	100	
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan	6 Unit	6 Unit	100	

		Pemeliharaan				
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	100 %	100 %	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	100 %	100 %	100%	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang dikelola	35 Dokumen	47 Dokumen	135	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang dikelola	500 Dokumen	504 Dokumen	101	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang didokumentasikan	570 Dokumen	630 Dokumen	111	
		Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang diautentifikasi	570 Dokumen	630 Dokumen	111	
		Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang dikelola	35 Dokumen	79 Dokumen	226	
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikelola	40 Dokumen	87 Dokumen	218	
		Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikelola	40 Dokumen	99 Dokumen	248	
		Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III yang dikelola	40 Dokumen	71 Dokumen	178	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	100 %	100 %	100%	
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi	1 Kasus	2 Kasus	200	

		yang dikelola				
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Sengketa Non Litigasi yang dikelola	2 Kasus	2 Kasus	100	
		Jumlah Koordinasi Rencana Aksi HAM di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	
3.	Biro Ekbang					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100%	100	100%	100	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	100	2 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2 Laporan	100	2 Laporan	100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	100	10 Orang	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	100	1 Paket	100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	100	1 Paket	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	100	1 Paket	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	100	1 Paket	100	
	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	100	1 Paket	100	
	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	100	20 Laporan	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	100	10 Unit	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	12 Unit	100	12 Unit	100	

	Lapangan					
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	100%	100	100%	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	11 Dokumen	100	11 Dokumen	100	
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	4 Dokumen	100	4 Dokumen	100	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jasa Keuangan dan Aneka Usaha	5 Dokumen	100	5 Dokumen	100	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	4 Dokumen	100	4 Dokumen	100	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100%	100	100%	100	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Dokumen	100	12 Dokumen	100	
4.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa					
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	4 laporan	4 laporan	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 laporan	1 laporan	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran yang Tersusun	4 laporan	4 laporan	100	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan dan Minuman yang Disediakan	11 jenis	11 jenis	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak Jenis Barang yang Digandakan	10 Jenis	10 Jenis	100	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	40 jenis	40 jenis	100	
	Penyelenggaraan		100 laporan	90 laporan	90	

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	100	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Sub Kegiatan :					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 jenis	2 jenis	100	
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
	Sub Kegiatan :					
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas	100 %	100 %	100	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan	100 %	100 %	100	



		Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat				
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/ jasa	1 laporan	1 laporan	100	
	Kegiatan : Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					
	Sub Kegiatan :					
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Tingkat pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	100 %	100 %	100	
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa	100 %	100 %	100	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	100 %	100 %	100	
	Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
	Sub Kegiatan :					
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil Program Pengembangan SD	27 orang	27 orang	100	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 orang	40 orang	50	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta advokasi, pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	200 Orang	130 Orang	65	
5.	Biro Organisasi					

	Program Administrasi Umum	Nilai SAKIP OPD	80 Poin	79,95 Poin	99,94	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	24 Poin	24 Poin	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	2 Laporan	2 Laporan	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	100 %	100 %	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	2 Jenis	40	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Jenis	26 Jenis	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan	2 Jenis	2 Jenis	100	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	60 Jenis	60 Jenis	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang	100 %	100 %	100	

		Dikelola				
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, ajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	9 Unit	9 Unit	100	
	Program Penataan Organisasi	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Anjab, RB dan SAKIP, Tata Laksana dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100	
	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Anjab	100 %	100 %	100	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Laporan Monev Kelembagaan Provins	41 Laporan	41 Laporan	100	
		Jumlah Peserta bimbingan teknis	41 Peserta	41 Peserta	100	
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumah Peserta Sosialisasi	50 Peserta	50 Peserta	100	
		Jumlah Laporan Monev Kelembagaan Kabupaten	6 Laporan	6 Laporan	100	
	Penataan Analisis	Jumlah Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	100	

	Jabatan	Evaluasi Jabatan				
		Jumlah Peserta Bimtek Anjab dan ABK	100 Peserta	100 Peserta	100	
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	100 %	100	
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring dan dievaluasi	6 Kabupaten	6 Kabupaten	100	
		Jumlah OPD yang Menginput PMP RB Tepat Waktu	41 OPD	41 OPD	100	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dibina pada Zona Integritas	5 OPD	5 OPD	100	
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD dan Kabupaten yang telah menyusun dan melengkapi dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas baik	42 OPD dan 6 Kabupaten	42 OPD dan 6 Kabupaten	100	
		Jumlah OPD dan Pemerintah Kabupaten yang menyusun LK JiP tepat waktu dengan kualitas baik	42 OPD dan 6 Kabupaten	42 OPD dan 6 Kabupaten	100	
		Jumlah OPD yang telah menyusun Indikator Kinerja berbasis outcome	42 OPD	42 OPD	100	
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja sesuai pedoman	41 OPD	41 OPD	100	
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	41 Dokumen	41 Dokumen	100	
		Jumlah OPD yang telah menyusun Peta Proses Bisnis	20 OPD	20 OPD	100	
		Jumlah Peraturan Gubernur	1 Pergub	1 Pergub	100	

	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	6 Kabupaten	6 Kabupaten	100	
		Jumlah OPD Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah menyusun dan menjabarkan 7 (tujuh) aspek kebijakan Pelayanan Publik	40 OPD	40 OPD	100	
		Jumlah OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat provinsi dan Nasional	10 OPD	10 OPD	100	
		T erlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat	30 OPD dan 6 Kabupaten	30 OPD dan 6 Kabupaten	100	
6.	Biro Umum					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ASN dengan Deskripsi pekerjaan yang sesuai	100	100	100	
		Nilai SAKIP lingkup SKPD	80 Poin	64,88 Poin	81,1	
		Tingkat dukungan mutu data sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkup SKPD	4	4	100	
		Tingkat capaian kinerja anggaran lingkup SKPD	100 %	98,6 %	98,6	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	24	17	71,25	
		Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	20	19	95,30	
		Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup	12	10	86,75	



		SKPD (Poin)				
		Nilai Evaluasi Internal Lingkup SKPD (Poin)	8	5	65,63	
		Nilai Capaian Kinerja Lingkup SKPD (Poin)	16	13	81,25	
		Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD (Persen)	95	95	100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	6	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)	1	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)	2	2	100	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)	6	6	100	
		Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Item)	6	4	66,67	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD (Persen)	95	95	100	
		Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap	90	90	100	

		Perencanaan Lingkup OPD (Persen)				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya (Orang)	300	279	93	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan (Persen)	100	100	100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD (Laporan)	12	12	100	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD (Laporan)	12	12	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (Laporan)	1	1	100	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan (Persen)	100	100	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang Tersusun (Laporan)	16	16	100	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)	2	2	100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD (Persen)	100	98,96%	98,96	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	30	30	100	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan (Unit)	4	4	100	
	Pembinaan, Pengawasan, dan	Jumlah Laporan Pembinaan,	3	3	100	



	Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	100	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	100	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD (Persen)	100	99	99,34	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)	575	575	100	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	75	72	96	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)	100	100	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan	100	100	99,78	



		Administrasi Umum Lingkup SKPD (Persen)				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)	25	25	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Jenis)	20	11	55	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)	15	15	100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)	15	15	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan (Jenis)	16	16	100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi (Persen)	100	100	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dokumen)	750	596	79,47	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD (Dokumen)	1	1	100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	95	97	101,71	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan (Unit)	5	5	100	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Unit)	2	2	100	
		Jumlah Jenis	2	2	100	



		Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Unit)	30	30	100	
		Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Unit)	20	20	100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	96	96,22	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola (Persen)	100	100	100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan (Rekening Tagihan)	4	4	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan (Jenis)	1	1	100	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100	98	98,49	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)	20	20	100	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)	150	150	100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)	70	70	100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	12	12	100	

	dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Persen)	100	99	99,15	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dikelola Gaji dan Tunjangannya (Orang)	2	2	100	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan)	5	5	100	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Dana Penunjang Operasionalnya (Orang)	2	2	100	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Persen)	100	99	99,15	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Rumah Jabatan yang Disediakan (Jenis)	40	40	100	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Rumah Jabatan yang Disediakan (Jenis)	40	40	100	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Kegiatan)	800	774	96,75	
	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan (Persen)	100	97	97,31	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Materi Pimpinan yang	2000	1.448	72,40	

		Disiapkan (Dokumen)				
		Jumlah Kegiatan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli (Kegiatan)	1200	1.055	87,92	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Kegiatan)	1200	1.070	89,17	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan (Dokumen)	2500	2.500	100	
	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan (Persen)	100	99	99,02	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Acara (Kegiatan)	1800	1.677	93,17	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terfasilitasi (Persen)	100	100	100	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan (Kegiatan)	1800	1.800	100	

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.



Pada tataran Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya perencanaan lingkup Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset lingkup Sekretariat Daerah.
3. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi lingkup Sekretariat Daerah.
4. Belum optimalnya manajemen sumber daya aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Sekretariat Daerah.
6. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai pasca bencana gempa bumi.

Selain permasalahan umum di atas, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal antara lain :

1. Kualitas dan kuantitas aparatur Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara optimal berdasarkan analisis beban kerja sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja organisasi.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan budaya kerja pada setiap unit belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
3. Sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Kurangnya sinergitas dengan lembaga pemerintahan lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat dinamis mempengaruhi perubahan tata kelola pemerintahan.
3. Kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat kompetensi sumberdaya aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku.



2. Perubahan pola pikir dan budaya kerja normatif aparatur pemerintah menjadi pola pikir dan budaya kerja konstruktif yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (outcome).
3. Kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang cukup potensial;
2. Komitmen pimpinan cukup tinggi dalam memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tentunya tidak terlepas dari layanan yang masing-masing biro berikan, adapun layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah meliputi pelayanan di bidang; pemerintahan dan kesra, hukum, perekonomian dan pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi serta administrasi, keuangan dan pelayanan umum. Gambaran pelayanan dari 6 Biro yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait;

Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum;



- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota, bantuan hukum.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas tugas Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan. Jenis kinerja pelayanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan administrasi pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana, Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- b. Pelaksanaan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana;

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan. Jenis layanan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan administrasi pimpinan

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Optimalnya Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum
		Optimalnya Kebijakan di Bidang



		Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan
		Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa
		Optimalnya Penataan Kelembagaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah
		Optimalnya Pelayanan Pimpinan dan Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lampiran I tentang Matrik Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2023

A. Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.767.990.137.76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.599.260.33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	17,599,260.33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,000,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,000,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00



	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276,799,013.78
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7,430,000.78
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,540,000.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,430,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15,320,000.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,430,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,444,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,300,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95,905,013.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,837,593,096.43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00

	Penyediaan Bahan/Material	200,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437,593,096.43
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000.00
	Pengadaan Mebel	10,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1,352,813,122.29
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	359,198,922.29
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	100,322,000.00

	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	131,299,000.00
	Fasilitasi Penataan Wilayah	127,577,922.29
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	670,971,000.00
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	213,420,000.00
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	228,321,000.00
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	229,230,000.00
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	322,643,200.00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	121,320,000.00
	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	100,123,000.00
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	101,200,200.00
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	15,386,894,743.38
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	14,092,413,843.00
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	11,448,513,843.00
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2,643,900,000.00
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	638,853,900.38
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	215,890,000.00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	222,543,900.00
	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	200,420,000.38
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	655,627,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	243,216,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	211,511,000.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	200,900,000.00

B. Biro Hukum



No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.767.990.137.76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.599.260.33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	17,599,260.33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,000,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,000,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276,799,013.78

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7,430,000.78
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,540,000.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,430,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15,320,000.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,430,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,444,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,300,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95,905,013.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,837,593,096.43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material	200,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437,593,096.43
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000.00
	Pengadaan Mebel	10,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	1,007,407,757.73
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	597,407,757.73
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	120,000,000.00
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	115,000,000.00
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	110,000,000.00
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	252,407,757.73
	Fasilitasi Bantuan Hukum	410,000,000.00
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	305,000,000.00
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	105,000,000.00

C. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.767.990.137.76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.599.260.33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	17,599,260.33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	10,000,000.00



	SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,000,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,000,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276,799,013.78
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7,430,000.78
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,540,000.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,430,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15,320,000.00

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,430,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,444,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,300,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95,905,013.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,837,593,096.43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material	200,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437,593,096.43
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000.00
	Pengadaan Mebel	10,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,998,767.22



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	604,444,654.64
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	204,444,654.64
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	104,444,654.64
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	100,000,000.00
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	30,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	30,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40,000,000.00
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	300,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	50,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	50,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	50,000,000.00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	50,000,000.00
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	700,185,430.41
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	400,185,430.41

	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	130,185,430.41
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	130,000,000.00
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	140,000,000.00
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	300,000,000.00
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120,000,000.00
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110,000,000.00
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	70,000,000.00

D. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.767.990.137.76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.599.260.33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	17,599,260.33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,000,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,000,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00



	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276,799,013.78
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7,430,000.78
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,540,000.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,430,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15,320,000.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,430,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,444,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,300,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95,905,013.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,837,593,096.43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material	200,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437,593,096.43
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000.00
	Pengadaan Mebel	10,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	523,785,141.74
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	174,595,047.74
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.74
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.00
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.00
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	174,595,047.00
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	58,198,349.00
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang	58,198,349.00



	dan Jasa	
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.00
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	174,595,047.00
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.00
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.00
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	58,198,349.00

E. Biro Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.767.990.137.76
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.599.260.33
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	17,599,260.33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,000,000.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10,000,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	10,000,000.00



	Realisasi Anggaran	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,000,000.00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	276,799,013.78
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7,430,000.78
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,540,000.00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5,430,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15,320,000.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,430,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,444,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,300,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95,905,013.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,837,593,096.43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200,000,000.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000.00
	Penyediaan Bahan/Material	200,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437,593,096.43
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150,000,000.00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150,000,000.00

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,000,000.00
	Pengadaan Mebel	10,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60,998,767.22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000.00
	Program Penataan Organisasi	1,171,461,739.20
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	394,298,152.20
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	136,432,717.40
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	141,432,717.40
	Penataan Analisis Jabatan	116,432,717.40
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	777,163,587.00
	Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	181,432,717.40
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	176,432,717.40

	Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	106,432,717.40
	Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	126,432,717.40
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	186,432,717.40

F. Biro Umum

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5,964,845,737.55
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,996,301.66
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,996,301.66
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,000,000.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,524,895,049.77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,124,895,049.77
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	105,000,000.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	155,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	40,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000.00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	50,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25,000,000.00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10,000,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	516,230,160.69
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	90,000,000.00



	Milik Daerah SKPD	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200,000,000.00
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	30,000,000.00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	51,230,160.69
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75,000,000.00
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	40,000,000.00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	150,000,000.00
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	40,000,000.00
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	60,000,000.00
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	30,000,000.00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	20,000,000.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,383,995,067.88
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	214,995,067.88
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	185,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	150,000,000.00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	125,000,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,000,000.00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134,000,000.00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	490,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6,559,721,427.96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	920,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270,000,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	155,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,764,721,427.96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	280,000,000.00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	900,000,000.00



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,150,000,000.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400,000,000.00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200,000,000.00
	Pengadaan Mebel	40,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,128,244,054.18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300,000,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,700,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,128,244,054.18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,213,763,675.41
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513,763,675.41
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	59,066,449,328.99
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,600,000,000.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300,000,000.00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,000,000.00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,200,000,000.00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	30,466,449,328.99
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	9,700,000,000.00

	Daerah	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	6,666,449,328.99
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	14,100,000,000.00
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	20,000,000,000.00
	Penyiapan Materi Pimpinan	3,000,000,000.00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	13,000,000,000.00
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	4,000,000,000.00
	Fasilitasi Keprotokolan	7,000,000,000.00
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2,000,000,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,000,000,000.00
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3,000,000,000.00



BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

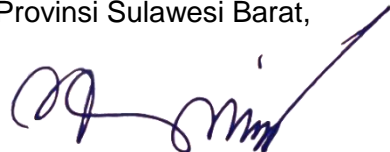
1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan secara optimal melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan segera menyusun RKA dan DPA Tahun 2023 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

5.2 Penutup

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini, memuat tujuan dan sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah
Provinsi Sulawesi Barat,



Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

NIP. : 19640015 199303 1 001

